



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Oleh : Naptalina Sipayung, SH.M.AP
Asisten Deputi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur Dan Pengawasan Wilayah III,
Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi**

Solo, 24 Agustus 2017

KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025

- Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road Map 2015-2019

- Gelombang I : 2010 - 2014
- Gelombang II : 2015 – 2019 Operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi



BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



NAWA CITA
JOKO WIDODO - JUSUF KALLA
2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

NAWA CITA 2014-2019 AGENDA PRIORITAS KE-2 : MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA



Apa itu Reformasi Birokrasi ?

Sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia untuk mencapai good dan clean governance menyangkut aspek manajemen pemerintahan yang meliputi 8 AREA PERUBAHAN

Upaya untuk menata ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan

Upaya menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah

Upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi dan memodernkan berbagai kebijakan

LANGKAH-LANGKAH REFORMASI BIROKRASI

Mendapatkan komitmen yang kuat dari pimpinan

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk *quick wins*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi



Tujuan: Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

S1. pemeritahan yang bersih ,
akuntabel dan berkinerja
tinggi

S2. pemerintahan yang
efektif dan efisien

S3. Pelayanan publik
yang baik dan
berkualitas

8 AREA PERUBAHAN RB

Organisasi

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)

Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*

Sumber daya manusia aparatur

SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Peraturan Perundang-undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik

layanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Budaya Kerja Aparatur (*culture set*
dan *mind set*)

Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

8 AREA PERUBAHAN RB

Organisasi

- Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Tatalaksana

- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Peraturan Perundang-undangan

- Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

Sumber Daya Manusia Aparatur

- SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan

- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas

- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik

- Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Mindset dan cultural Set Aparatur

- Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

KONSEP PENYEMPURNAAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Kriteria penilaian

- **Kriteria penilaian didasarkan kepada sbb :**
- A. Jika ada perubahan yang nyata dan berkesinambungan
- B. Jika sudah dilakukan evaluasi secara berkala
- C. Sudah dilaksanakan / diimplemetasikan
- D. Hanya sebatas komitmen/niat
- E. Tidak ada upaya

Kisi-Kisi Manajemen Perubahan

- **Kepemimpinan**

- Keterlibatan pimpinan dalam menjalankan program Reformasi Birokrasi
- Membangun budaya kerja positif (menerapkan nilai-nilai organisasi)
- Mengembangkan komunikasi internal dan eksternal
- Menerapkan praktik kepemimpinan yang terbuka terhadap kritik, masukan, dan saran
- Menerapkan praktik kepemimpinan yang berintegritas (tidak menerima suap, gratifikasi, tidak mempraktikkan kewenangan yang berbenturan dengan kepentingan)

Kisi –Kisi Manajemen Perubahan

- **Pengelolaan Perubahan**

- Road map RB IP telah memuat rencana-rencana perubahan yang memenuhi harapan para pemangku kepentingan, selaras dengan *Road Map* RB Nasional 2015-2019, telah dijabarkan ke dalam rencana aksi, dan telah diinternalisasi
- Road map telah memuat *quick wins* dan pelaksanaannya telah memenuhi harapan para pemangku kepentingan
- Tim RBI secara berkesinambungan telah melakukan upaya percepatan RB
- Agen perubahan sudah menerapkan inovasi-invoasi dan telah menjadi *role model* di lingkungan kerjanya
- Melaksanakan *monitoring* terhadap pengembangan RB dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan RB

Kisi-Kisi Peraturan Perundang-Undangan

- **Tertib peraturan perundangan dan deregulasi peraturan**
 - Tertib perumusan peraturan perundangan yang seharusnya telah ditetapkan sesuai mandat. Baik turunan dari UU, perintah presiden, paket kebijakan, dll (yang secara eksplisit diamanatkan kepada instansi yang bersangkutan_
 - Terdapat deregulasi untuk mewujudkan kemudahan pemberian pelayanan/prosedur/upaya mengurangi peraturan yang ada
- **Penyusunan peraturan perundang-undangan**
 - Pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan peraturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih

Kisi-Kisi Peraturan Perundang-Undangan

- **Efektifitas peraturan perundangan yang telah diterbitkan**
 - Monitoring terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan dalam rangka memastikan peraturan yang dikeluarkan masih relevan dan efektif
 - Peraturan perundang-undangan disusun oleh SDM yang berkompentensi di bidang hukum
 - Tersedianya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang lengkap, sistematis, dan terintegrasi.

Kisi-Kisi Penataan Organisasi



- **Evaluasi Audit Organisasi**

- Kebijakan internal evaluasi/audit organisasi secara berkala telah ditetapkan
- Evaluasi/audit organisasi sudah berdasarkan Ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
- Struktur organisasi telah efektif mencapai tujuan pembentukannya
- Memastikan tidak terdapat tumpang tindih fungsi
- Memastikan bahwa mandat sesuai dengan peraturan perundangan telah dijabarkan dalam struktur organisasi yang sesuai

- **Restrukturisasi**

- Memperbaiki organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan tepat ukuran

Kisi-Kisi Penataan Tatalaksana

- **Peta Proses Bisnis**
 - Peta proses bisnis mampu menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
- **SOP**
 - SOP dapat dijadikan standar pelaksanaan kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien
- **Penggunaan *e-government***
 - *E-gov* mampu mendorong efisiensi birokrasi pada internal organisasi

Kisi-Kisi Penataan Tatalaksana

- **Peta Proses Bisnis**
 - Peta proses bisnis mampu menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi
- **SOP**
 - SOP dapat dijadikan standar pelaksanaan kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien
- **Penggunaan *e-government***
 - *E-gov* mampu mendorong efisiensi birokrasi pada internal organisasi

Kisi-Kisi Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

MENGACU KEPADA PP Nomor 11 Tahun 2017

- **Penyusunan rencana kebutuhan pegawai**
- **Pengadaan/rekrutmen:**
 - Rekrutmen CPNS
 - Rekrutmen PNS pada jabatan (pelaksana, pengawas, administrator)
 - Rekrutmen PNS pada JPT (yang dilihat: kualitas hasil rekrutmen terbuka melalui evaluasi kinerja)
- **Penempatan**
- **Pembinaan karir (manajemen kinerja terindividu, manajemen pelatihan, pengembangan kompetensi, penegakkan disiplin dan kode etik pegawai, *reward* dan *punishment*)**
- **Manajemen data pegawai**
- **Kualitas pelayanan administrasi kepegawaian**

Kisi-Kisi Akuntabilitas

- **Keterlibatan Pimpinan**

- *Plan*: Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) terlibat langsung dalam perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi (memberikan arahan, memastikan tujuan, dan sasaran organisasi telah berorientasi kepada hasil)
- *Do*: Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah memastikan, menyepakati, dan memfasilitasi strategi dalam rangka mencapai target-target kinerja yang ditetapkan
- *Check*: Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah melakukan monitoring dan evaluasi target-target kinerja yang ditetapkan
- *Action*: Pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) berpartisipasi aktif dalam mereview dan mendorong (memfasilitasi) penyempurnaan renstra

Kisi-Kisi Akuntabilitas

- **Perjanjian Kinerja**

- *Plan*: seluruh pegawai telah menandatangani (memiliki) perjanjian (target) kinerja yang spesifik (berupa Perjanjian Kinerja dan SKP)
- *Check*: Perjanjian Kinerja tersebut, telah dimonitor dan dievaluasi secara periodik
- *Act*: Capaian kinerja dari PK telah dilakukan perbaikan dan dikaitkan dengan tunjangan kinerja (tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan capain kinerja masing-masing pegawai)

Kisi-Kisi Akuntabilitas

- **Akuntabilitas Anggaran**
 - *Plan*: Pengajuan Anggaran didahului dengan perencanaan kerja terukur, tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak relevan dengan sasaran
 - *Do*: Penggunaan anggaran sudah mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak mendukung
 - *Act*: sudah ada penajaman kegiatan

Kisi-Kisi Penguatan Pengawasan

- **Penguatan integritas**
 - Pengendalian gratifikasi
 - *Whistle-Blowing System (WBS)*
 - Penanganan benturan kepentingan
 - Zona Integritas
 - Laporan harta kekayaan
- **SPIP**
 - SPIP
 - Manajemen risiko

Kisi-Kisi Penguatan Pengawasan

- **Penanganan Pengaduan Masyarakat**
 - Penanganan pengaduan masyarakat
- **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah**
 - Independensi
 - Profesionalisme
 - Proses bisnis
 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Kisi-Kisi Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- **Kebijakan Pelayanan**
 - Standar pelayanan
 - Publikasi maklumat pelayanan
- **Profesionalisme SDM**
 - Kompetensi pelaksana layanan
- **Sarana dan Prasarana Pelayanan**
 - Tersedianya fasilitas layanan yang memadai dan mengakomodir kebutuhan pengguna layanan
- **Sistem Informasi Pelayanan**
 - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
- **Konsultasi dan Pengaduan**
 - Pengelolaan pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan



**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PER MENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 52 TAHUN 2014**

ZONA INTEGRITAS

- predikat yang diberikan kepada **instansi pemerintah** yang pimpinan dan jajarannya mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

DEFINISI

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- predikat yang diberikan kepada suatu Unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tataaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja mempunyai **komitmen** untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam **hal pencegahan korupsi** dan **peningkatan kualitas pelayanan publik**

DEFINISI

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- predikat yang diberikan kepada suatu Unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan **penguatan kualitas pelayanan publik**

WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI



Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pada instansi pemerintah yang memenuhi indikasi bebas dari korupsi dan melayani publik dengan baik

TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.

TETAPKAN UNIT KERJA YANG AKAN DIJADIKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM).

TETAPKAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI UNTUK UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS.

PELAKSANAAN RENCANA AKSI.

UKUR INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.

LAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS INDIKATOR HASIL DAN PROSES YANG DICAPAI.

AJUKAN USULAN UNTUK DIEVALUASI OLEH KEMENTERIAN PANRB.

TAHAPAN PROSES PEMBANGUNAN

PENCANANGAN ZI

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh atau sebagian besar pegawai
- Pernyataan komitmen telah siap membangun Zona Integritas

PEMBANGUNAN ZI

- Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
- Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM

PENGUSULAN

- Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
- TPI melaporkan kepada pimpinan instansi
- Pengusulan ke Kemen PAN RB

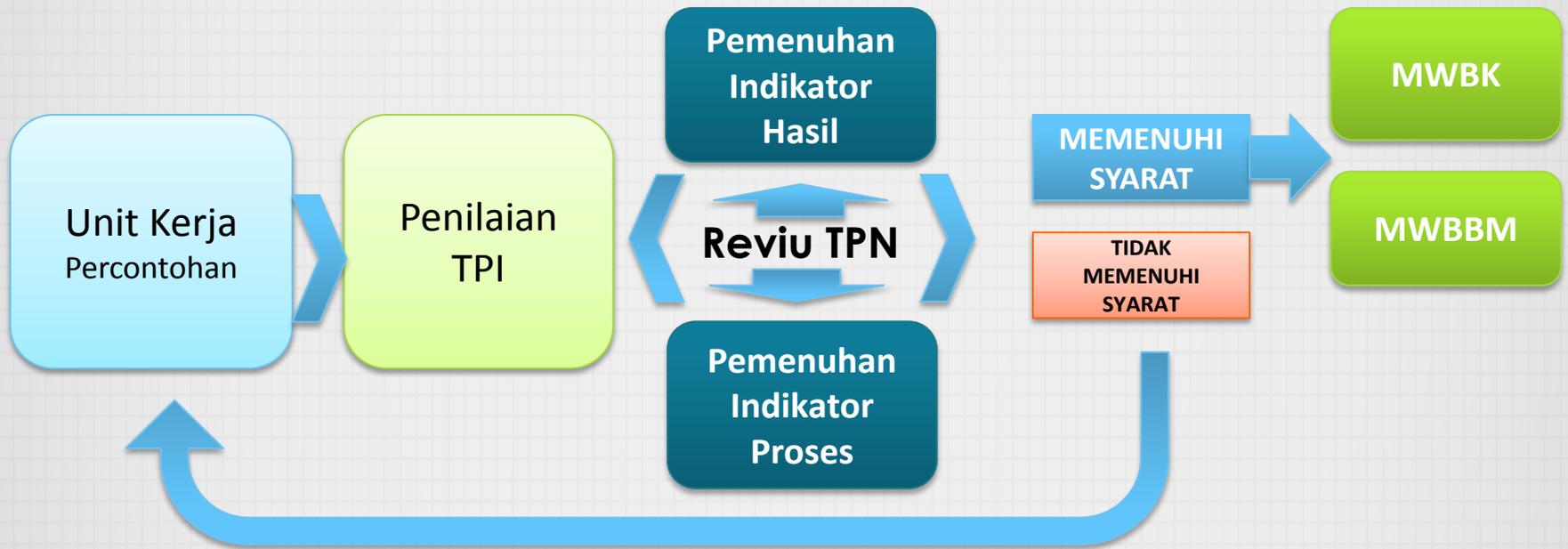
Reviu TPN

- Reviu oleh Tim Penilai Nasional

Penetapan WBK/WBBM

- MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK
- MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM

PROSES PENILAIAN DAN PENETAPAN



6 AREA PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS

Tatalaksana

- Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance

Sumber Daya Manusia Aparatur

- SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Pengawasan

- Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

Akuntabilitas

- Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik

- Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Mindset dan cultural Set Aparatur

- Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

EVALUASI

5
EVALUASI
YANG
DILAKUKAN

REFORMASI BIROKRASI

ZONA INTEGRITAS
(MENUJU WBK/WBBM)

OBJEK
EVALUASI

Instansi Pemerintah
(Kementerian/Lembaga/Pemda)

Unit Kerja Pelayanan
Instansi Pemerintah
(contoh: Kantor Pelayanan dsb)

UNSUR
PENILAIAN

60
%

Proses (8 Area)

Manajemen Perubahan
(5)

Akuntabilitas (6)

Tatalaksana
(5)

Pengawasan (12)

Manajemen SDM
(15)

Pelayanan Publik (6)

Organisasi (6)

Peraturan
Perundang-undangan (5)

Proses (6 Area)

Manajemen Perubahan
(5)

Akuntabilitas (10)

Tatalaksana (5)

Pengawasan (15)

Manajemen SDM (15)

Pelayanan Publik (10)

40
%

Hasil (3 Sasaran)

1. Nilai Akuntabilitas (14)
2. Survey Integritas
Organisasi (Internal) (6)

1. Opini BPK (3)
2. Survey Persepsi Korupsi
(Survey Eksternal) (7)

Survey Persepsi Pelayanan
Publik (Eksternal) (10)

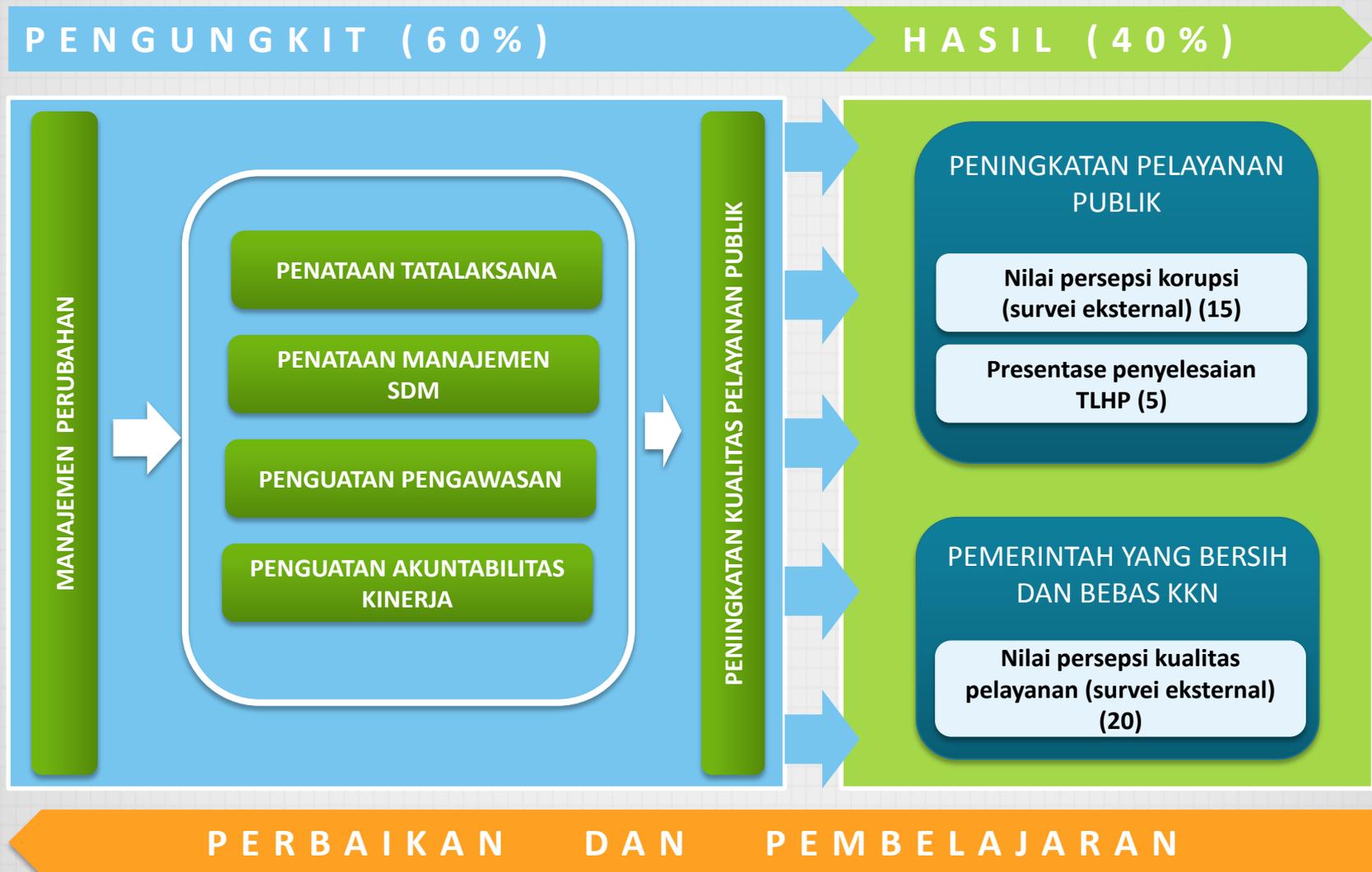
Hasil (2 Sasaran)

1. Survey Persepsi
Korupsi (15)
2. Temuan Tindak Lanjut
Pemeriksaan (5)

Survey Persepsi
Pelayanan Publik (20)

SURVEI PERSEPSI KORUPSI OLEH KEMENPANRB DAN KPK
SURVEI PERSEPSI PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENPANRB DAN BPS

KERANGKA LOGIS PENILAIAN



Target yg akan dicapai pada Manajemen Perubahan

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM

B Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan tibulnya resistensi terhadap perubahan

Indikator pada Manajemen Perubahan

Tim Kerja (1)

- **Tim telah dibentuk**
- **Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur yang jelas**

Rencana Kerja pembangunan ZI (1)

- **Rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat.**
- **Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas**
- **Telah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM**

Manajemen Perubahan

Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

- **Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai rencana**
- **Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas**
- **Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti**

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

- **Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM**
- **agen perubahan sudah ditetapkan**
- **Pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi**
- **keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM**

Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tatalaksana

a. Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI menuju WBL/WBBM

b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona Integritas menuju WBK/WBBM

c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Indikator pada Penataan Tatalaksana

Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

- SOP mengacu proses bisnis instansi
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
- Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi.

E-government (2)

- sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
- Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
- Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi.
- Monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik

Penataan Tatalaksana

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

- Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Target yang akan dicapai melalui Program Penataan sistem Manajemen SDM

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM pada masing2 Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM pd masing2 ZI menuju WBL/WBBM

c. Meningkatnya disiplin SDM Apartur pada masing2 Zona Integritas menuju WBK/WBBM

d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM Apartur pada masing2 Zona Integritas menuju WBK/WBBM

e. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing2 Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Indikator pada Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan (2)

- kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
- penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
- Monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

Pola Mutasi Internal (2)

- Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
- mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
- monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

- Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
- Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
- unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)
- monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala

Penataan Sistem Manajemen SDM

Penetapan kinerja individu (4)

- penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- Ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
- Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

- Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

- Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah pada masing2 Zona Integritas menuju WBK/WBBM

b. Meningkatnya Akuntabilitas instansi pemerintah

Indikator pada Penguatan Akuntabilitas Kinerja

keterlibatan pimpinan (5)

- pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
- pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
- pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (3)

- Dokumen perencanaan sudah ada
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- indikator kinerja telah SMART
- laporan kinerja telah disusun tepat waktu
- Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Target yang akan dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing2 instansi pemerintah

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing2 instansi pemerintah

c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing2 instansi pemerintah

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing2 instansi pemerintah

Indikator pada Penguatan Pengawasan

Pengendalian Gratifikasi (3)

- dilakukan *public campaign*
- Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan

Penerapan SPIP (3)

- dibangun lingkungan pengendalian
- dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
- dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat (3)

- Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
- Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Penguatan Pengawasan

Whistle-Blowing System (3)

- Whistle Blowing System telah diinternalisasi
- Whistle Blowing System telah diterapkan
- Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System
- Hasil evaluasi atas penanganan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Penanganan Benturan Kepentingan (3)

- Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
- Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
- dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Target yang akan dicapai melalui Program Peningkatan kualitas pelayanan publik

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, aman dan mudah dijangkau pd instansi pemerintah

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing2 instansi pemerintah

Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Standar Pelayanan (3)

- Terdapat kebijakan standar pelayanan.
- Standar pelayanan telah dimaklumkan.
- Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
- Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

Budaya pelayanan prima (3)

- Sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima.
- Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media.
- Terdapat sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.
- Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.
- Terdapat inovasi pelayanan

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

- Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

HASIL (40)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (20)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

Kualitas Pelayanan Publik (20)

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)

SYARAT PENGAJUAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK

SYARAT PENETAPAN WBK/WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal	18	18
Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	13,35	13,35
Nilai sub-komponen “Persentasi TLHP” minimal	3,5	3,5
Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal	-	16

Point Penting yang menjadi fokus perbaikan untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi



- 1. Jadikan Reform / perubahan menjadi kebutuhan instansi**
- 2. Lakukan tindaklanjut terhadap seluruh rekomendasi perbaikan**
- 3. Buat rencana aksi perbaikan setiap area perubahan**
- 4. Perlu membuktikan perubahan yang terjadi setelah reform**
- 5. Perlu memperhatikan harapan /kepuasan stakeholders dengan melakukan survey secara berkala dan menindaklanjuti keluhan penerima layanan**
- 6. Lakukan inovasi pelayanan untuk mempercepat pelayanan yang memberi kepuasan kepada penerima layanan**
- 7. Komunikasikan kepada publik atau masyarakat apa yang sudah dilakukan oleh instansi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

TERIMA KASIH